

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SPEKTRUM KEAHLIAN DI SMKN 2 DEPOK SLEMAN

IMPLEMENTATION OF EXPERTISE SPECTRUM POLICY IN STATE VOCATIONAL SCHOOL 2 DEPOK SLEMAN

Muhammad Rizky Darmawan
Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY
alwysprfct@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan spektrum keahlian, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman. Penelitian implementasi kebijakan ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan pada empat aspek pokok implementasi yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles dan Huberman yakni, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian (1) Implementasi kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman didukung oleh: a) Komunikasi dengan mengadakan *workshop* spektrum keahlian dengan mengundang dari pihak Balai Dikmen dan Dinas Pendidikan Provinsi DIY dan sosialisasi kepada orang tua siswa. b) Sumber daya didukung oleh sumber daya manusia melalui staf manajemen sekolah, sumber dana dari pemerintah, orang tua, komite sekolah, perguruan tinggi dan pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI). c) Disposisi didukung dengan komitmen penuh dalam menjalankan kebijakan. d) Struktur birokrasi didukung oleh tim staf manajemen sekolah yang termuat didalam SK dari sekolah. (2) Faktor pendukung berupa adanya dukungan dari staf manajemen sekolah dan para implementator kebijakan lainnya. Sedangkan faktor penghambatnya berupa penyelenggaraan bidang keahlian tidak bisa dilakukan secara serentak, masih kurangnya anggaran untuk kelengkapan alat dan instrumen.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Spektrum keahlian, SMKN 2 Depok Sleman

Abstract

This study aims to describe the spectrum expertise policy implementation, as well as supporting and inhibiting factors in the spectrum of policy implementation in SMK 2 Depok Sleman. This research on policy implementation refers to the theory policy implementation of Edward III which emphasizes four main aspects of implementation, namely, communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection techniques used by researchers were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use the theory of Miles and Huberman, namely, data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study are as follows: (1) Implementation of the spectrum of expertise policies at Depok Sleman 2 Vocational Schools supported by: a) Communication by organizing a spectrum of expertise workshops invited from the DIY Dikmen and DIY Provincial Education Offices and dissemination to parents students. b) Resources are supported by human resources through school management staff, funding sources from the government, parents, school committees, universities, and DUDI (business and industrial world). c) Disposition is supported by full commitment in carrying out policies. d) The bureaucratic structure is supported by a team of school management staff contained in the decree from the school. (2) Supporting factors in the form of support from school management staff and other policy implementers. while inhibiting factors in the form of organizing the field of expertise cannot be carried out simultaneously, there is still a lack of budget for completing tools and instruments.

Keyword: Policy implementation, spectrum of expertise, SMKN 2 Depok Sleman

PENDAHULUAN

Pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sangat erat kaitannya dengan belajar keterampilan dan penguasaan bidang keahlian sesuai dengan tempat industri. Menurut Murniati dan Nasir (2009: 2) sebagaimana dikutip oleh Prasetyani (2017: 16) menyatakan pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang memberikan bekal berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada peserta didik sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan dirinya, dunia kerja, dan pembangunan bangsanya. Kemampuan lulusan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi prioritas dari pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam menyeleksi tenaga kerja yang berkualitas. Namun selama ini pendidikan menengah kejuruan masih menyumbang angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di setiap tahunnya menurut perhitungan yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Secara nasional, Menurut Badan Pusat Statistik (2018) dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2018, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,24 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat

dari TPT SD ke bawah paling kecil di antara semua tingkat pendidikan, yaitu sebesar 2,43 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, peningkatan TPT hanya terjadi pada tingkat pendidikan Universitas, sedangkan TPT pada tingkat pendidikan lainnya menurun.

Sedangkan untuk lingkup Yogyakarta melalui Badan Pusat Statistik (2018) berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja pada Agustus 2018, TPT untuk lulusan universitas paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu 8,28 persen. TPT tertinggi berikutnya adalah Diploma (DI/II/III) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) masing-masing 4,91 persen, serta Sekolah Menengah Umum sebesar 2,87 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan S1, Diploma, SMK, dan SMU. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengangguran di D.I. Yogyakarta adalah pengangguran terdidik dengan pendidikan minimal SMA/SMK ke atas. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian yang mereka miliki dengan harapan gaji yang akan diterima juga sesuai. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 0,74 persen.

Dari kedua data tersebut diperoleh informasi bahwasannya tingkat pengangguran terbuka yang lulusan SMK memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah khususnya di Yogyakarta sendiri. Dilihat dari persentase pengangguran lulusan SMK untuk tingkat nasional masih mendominasi, namun untuk tingkat daerah khususnya di Yogyakarta masih berada di bawah lulusan SMA dan Perguruan Tinggi/Universitas, tetapi hal itu masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan yang masih menjadikan

pendidikan SMK menjadi salah satu sumber pengangguran, misalnya dengan keahlian lulusan yang tidak sesuai dengan industri, lulusan SMK yang bekerja tidak relevan dengan prodi/jurusan, lulusan yang belum berkualitas dan terampil, dan kurikulum SMK yang belum ideal.

Perkembangan industri yang semakin pesat tidak serta merta memiliki dampak yang baik bagi lulusan SMK, masih banyak bidang / program / kompetensi keahlian dari lulusan SMK yang belum sesuai dengan kebutuhan industri. Menurut Wahyu Nursalim (2016: 276) mengatakan bahwa ketidaksesuaian antara lulusan SMK dengan kebutuhan industri dibuktikan dengan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki siswa lulusan SMK dengan jenis kompetensi yang dipersyaratkan industri untuk menangani jenis pekerjaan tertentu. Faktor lain yang masih menjadi persoalan bagi lulusan SMK ialah masih rendahnya kompetensi dan keterampilan dari lulusan SMK.

Pada dunia industri lulusan SMK dituntut untuk dapat menguasai kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri tersebut. Menurut Dwi Jayanti (2014: 5) kesiapan kerja lulusan masih rendah dan kualitas lulusannya juga masih belum mampu beradaptasi dengan sarana dan fasilitas yang terdapat di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dimana fasilitas yang ada di dunia kerja sudah mengalami kemajuan yang kurang sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh lulusan SMK. Pembekalan kompetensi dan keterampilan untuk lulusan SMK perlu ditingkatkan lagi, pemerintah berusaha memberikan solusi dengan mengeluarkan kebijakan spektrum keahlian dalam hal ini diharapkan dapat memperbaiki struktur keahlian sesuai kompetensi keahlian.

Pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah

Kejuruan (MAK) menetapkan bahwa Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) memuat bidang/ program/ kompetensi keahlian sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Spektrum keahlian sebagaimana dimaksud merupakan acuan dan pembukaan dalam penyelenggaraan bidang/ program/ kompetensi keahlian pada SMK/MAK. Pada setiap kompetensi keahlian yang dibuka, SMK/MAK dapat mengkhususkan kompetensi tertentu (konsentrasi keahlian) sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja terkait dengan tidak mengabaikan kemampuan dasar keahlian tersebut. Setiap SMK/MAK dapat membuka program pendidikan 3 tahun maupun program pendidikan 4 tahun. Pembukaan bidang/ program/ kompetensi keahlian pada SMK/MAK baru mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pendirian satuan pendidikan SMK/MAK.

SMKN 2 Depok Sleman ini sekarang sudah menerapkan Perdirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud No. 6 Tahun 2018 Tentang Spektrum Keahlian (SMK)/ MAK selama dua tahun sejak awal dikeluarkannya peraturan ini. Peneliti memilih SMKN 2 Depok Sleman sebagai tempat penelitian, karena SMKN 2 Depok Sleman merupakan salah satu SMK Negeri terbaik yang ada di DIY serta memiliki segudang prestasi dari berbagai bidang didukung oleh kerjasama yang baik dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) salah satunya yaitu, dengan menerapkan sistem magang pada program pendidikan tahun ke-empat yang sudah sesuai dengan kebijakan spektrum keahlian sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bisa siap kerja.

Terkait bidang keahliannya yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan spektrum keahlian itu ada 3 bidang keahlian, yaitu teknologi dan rekayasa; energi dan pertambangan; dan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk program keahliannya sekolah

menyelenggarakan 9 program keahlian yaitu, teknik konstruksi dan properti; teknik mesin; teknik kimia; teknik otomotif; teknik elektronika; teknik perminyakan; geologi pertambangan; teknik komputer dan informatika; dan teknik ketenagalistrikan.

Selanjutnya untuk kompetensi keahliannya sekolah menyelenggarakan 14 kompetensi keahlian yaitu, konstruksi gedung sanitasi dan perawatan; desain permodelan, dan informasi bangunan; teknik audio video; teknik elektronika daya dan komunikasi; teknik otomasi industri; teknik komputer dan jaringan; sistem informasi jaringan dan aplikasi; teknik fabrikasi logam dan manufaktur; teknik body otomotif; teknik dan manajemen perawatan otomotif; kimia industri; kimia analisis; geologi pertambangan; dan terakhir teknik pengolahan minyak, gas, dan petrokimia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019 - 13 Juli 2019 di SMKN 2 Depok Sleman.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian, yaitu meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru. Dalam penelitian ini, objek kajiannya adalah situasi sosial dan interaksi sosial yang menggambarkan Implementasi Kebijakan Spektrum Keahlian di SMKN 2 Depok Sleman Yogyakarta.

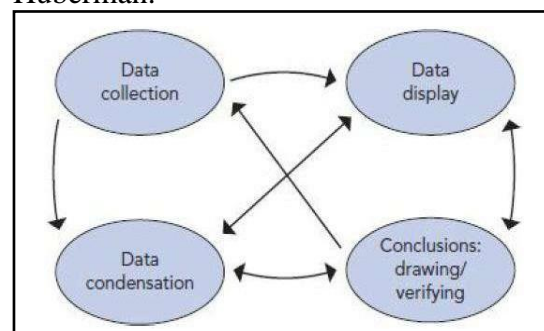
Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini proses pengumpulan data melalui teknik observasi akan menggunakan observasi tal

partisipatif. Wawancara dilakukan kepada para narasumber yaitu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan pada dokumen-dokumen yang mendukung peneliti dan memperoleh data mengenai topik atau tema yang diteliti.. Dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti akan mampu melengkapi hasil pengambilan data selama proses penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman ini adalah analisis model Miles and Huberman.



Gambar.1 Model Miles dan Huberman

Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. (Miles and Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Spektrum Keahlian Di SMKN 2 Depok Sleman

SMKN 2 Depok Sleman melaksanakan kebijakan spektrum keahlian dengan mengacu pada peraturan Perdirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Tahun 2018 No. 06 tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen kurikulum pembelajaran serta berusaha mengadministrasikannya melalui pembentukan struktur birokrasi/tim yang terhimpun ke dalam staf manajemen sekolah. Untuk membahas implementasi kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman, peneliti akan menggunakan teori

implementasi dari Edward III dengan empat aspek pokok yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta ditambah teori-teori lain yang relevan.

a. Komunikasi

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman, sekolah melakukan komunikasi dengan pelaksana kebijakan dan juga orang tua siswa.

1) Komunikasi dengan pelaksana kebijakan

Komunikasi dengan pelaksana kebijakan dilakukan sekolah dengan melakukan sosialisasi kepada staf manajemen, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan para *stakeholder* terkait kebijakan spektrum keahlian yakni dengan mengundang perwakilan dari Balai Dikmen atau Dinas pendidikan provinsi DIY dengan mengikuti *workshop* spektrum keahlian yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Hal inilah yang menjadi kunci dalam sosialisasi terkait dengan kebijakan gerakan literasi sehingga pelaksana kebijakan di sekolah memahami seperti apa spektrum keahlian dan bagaimana cara melaksanakannya.

2) Komunikasi dengan orang tua

Komunikasi dengan orang tua dilakukan oleh sekolah terkait dengan kebijakan spektrum keahlian, disampaikan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) serta menjelang tahun ajaran baru.

Selain berkomunikasi secara langsung, sekolah juga memanfaatkan media sosial untuk mengkomunikasikan kebijakan spektrum keahlian, salah satunya melalui grup *whatsapp* yang berisi orang tua dari tiap tiap kelas di program keahlian yang ada di SMKN 2 Depok Sleman.

b. Sumber daya

1) Sumber daya manusia

Terkait dengan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman semua warga sekolah maupun luar sekolah baik itu dari staf manajemen sekolah yang meliputi kepala sekolah,

wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tata usaha (administrasi), tim ketua program keahlian (KPK), komite sekolah dan juga melibatkan pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pakar industri, perguruan tinggi dan juga orang tua/wali.

2) Sumber dana

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman, sumber dana untuk melaksanakan kebijakan adalah dari pemerintah sebagai sumber utamanya, kemudian juga ada dari komite sekolah hasil sumbangan masyarakat.

3) Alokasi waktu

Alokasi waktu untuk melaksanakan kebijakan spektrum keahlian tercantum di dalam struktur kurikulum yang diterjemahkan kembali kedalam beberapa mata pelajaran sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh oleh siswa, baik selama 3 tahun maupun yang 4 tahun.

c. Disposisi

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman, para implementator kebijakan yang ada di sekolah berkomitmen secara penuh untuk menjalankan kebijakan spektrum keahlian.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dibuat oleh sekolah untuk melaksanakan kebijakan spektrum keahlian adalah dengan membentuk staf manajemen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, setelah itu terdapat wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan diikuti oleh tata usaha (administrasi), selanjutnya diikuti oleh tim ketua program keahlian (KPK) yang beranggotakan dari seluruh program yang ada di SMKN 2 Depok Sleman, terakhir baru melibatkan pihak dari komite sekolah, pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pakar industri, dan perguruan tinggi. Staf manajemen tersebut menjalankan *job* deskripsi tugasnya masing – masing.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Spektrum Keahlian Di SMKN 2 Depok Sleman

a. Faktor Pendukung

Dalam konteks kebijakan spektrum keahlian SMKN 2 Depok Sleman aspek komunikasi telah terpenuhi hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan penuh dari semua warga sekolah termasuk dari staf manajemen sekolah sebagai pelaksana kebijakan juga ada dukungan dari media sosial seperti grup *whatsapp* mempermudah komunikasi dengan orang tua. Kemudian untuk aspek sumber daya telah terpenuhi dengan adanya dukungan dana yang bersumber dari komite sekolah hasil sumbangan dari masyarakat walau nominalnya tidak terlalu besar.

Sementara itu untuk aspek disposisi telah terpenuhi dengan adanya kerjasama yang baik dari staf manajemen sekolah dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan spektrum keahlian. Adanya komitmen yang baik dari seluruh warga sekolah dan staf manajemen sekolah. Terakhir untuk aspek struktur birokrasi telah terpenuhi dengan adanya SK untuk staf manajemen sekolah yang memuat *job* deskripsi tugasnya masing-masing.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara serentak. Kemudian terkait dengan pendanaan spektrum keahlian sekolah hanya memiliki sumber dana terbatas dari pemerintah dan sumbangan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi Kebijakan Spektrum Keahlian di SMKN 2 Depok Sleman

a. Komunikasi

1) Komunikasi dengan pelaksana kebijakan

Komunikasi dengan pelaksana kebijakan dilakukan sekolah dengan melakukan sosialisasi kepada staf manajemen, tenaga pendidik, tenaga

kependidikan, dan para *stakeholder* terkait kebijakan spektrum keahlian yakni dengan mengundang perwakilan dari Balai Dikmen atau Dinas pendidikan provinsi DIY dengan mengikuti *workshop* spektrum keahlian yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.

2) Komunikasi dengan orang tua

Komunikasi dengan orang tua dilakukan oleh sekolah terkait dengan kebijakan spektrum keahlian, disampaikan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan juga memanfaatkan media sosial salah satunya melalui grup *whatsapp* yang berisi orang tua dari tiap-tiap kelas di bidang keahlian.

b. Sumber daya

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman semua warga sekolah maupun luar sekolah baik itu dari staf manajemen sekolah yang meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tata usaha (administrasi), tim ketua program keahlian (KPK), komite sekolah dan juga melibatkan pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pakar industri, perguruan tinggi, dan juga orang tua.

2) Sumber dana

Sumber dana untuk melaksanakan kebijakan spektrum keahlian yang ada di SMKN 2 Depok Sleman adalah dari pemerintah sebagai sumber utamanya, kemudian juga ada dari komite sekolah hasil sumbangan masyarakat.

3) Alokasi waktu

Alokasi waktu untuk melaksanakan kebijakan spektrum keahlian yang ada di SMKN 2 Depok Sleman adalah tercantum di dalam struktur kurikulum yang diterjemahkan kembali kedalam beberapa mata pelajaran sesuai dengan jurusan/bidang keahlian.

c. Disposisi

Pelaksanaan kebijakan spektrum keahlian di SMKN 2 Depok Sleman para implementator kebijakan yang ada di

sekolah berkomitmen secara penuh untuk menjalankan kebijakan spektrum keahlian.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang dibuat oleh sekolah untuk melaksanakan kebijakan spektrum keahlian adalah dengan membentuk staf manajemen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, setelah itu terdapat wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan diikuti oleh tata usaha (administrasi), selanjutnya diikuti oleh tim ketua program keahlian (KPK) yang beranggotakan dari seluruh program keahlian yang ada di SMKN 2 Depok Sleman, terakhir baru melibatkan pihak dari komite sekolah, pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pakar industri, dan perguruan tinggi. Staf manajemen tersebut menjalankan *job* deskripsi tugasnya masing – masing sesuai dengan SK yang berlaku dari sekolah.

2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Spektrum Keahlian di SMKN 2 Depok Sleman

a. Faktor Pendukung

- 1) Dukungan penuh dari semua warga sekolah termasuk dari staf manajemen sekolah sebagai pelaksana kebijakan.
- 2) Adanya media sosial seperti grup *whatsapp* mempermudah komunikasi dengan orang tua.
- 3) Adanya dukungan dana yang bersumber dari komite sekolah hasil sumbangan dari masyarakat walau nominalnya tidak terlalu besar.
- 4) Adanya kerjasama yang baik dari staf manajemen sekolah dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan spektrum keahlian.
- 5) Adanya komitmen yang baik dari seluruh warga sekolah dan staf manajemen sekolah.
- 6) Adanya SK untuk staf manajemen sekolah yang memuat *job* deskripsi tugas masing-masing anggota.

b. Faktor Penghambat

- 1) Pelaksanaan kebijakan spektrum keahlian tidak bisa dilakukan secara serentak.
- 2) Terkait dengan pendanaan spektrum keahlian sekolah hanya memiliki sumber dana terbatas dari pemerintah dan sumbangan dari masyarakat.
- 3) Pengadaan kelengkapan alat yang masih minim demi mendukung penyelenggaraan bidang keahlian.
- 4) Masih sulitnya membuat regenerasi dari staf manajemen.
- 5) Masih ada bapak/ibu guru dalam hal ini juga meliputi anggota struktur birokrasi belum memahami secara utuh tentang kurikulum yang berlaku.

Saran

1. Penyelenggaraan program keahlian hendaknya dilakukan secara serentak, melalui pemahaman karakter dari masing-masing program keahlian serta komunikasi yang baik dengan ketersediaan sarana dan prasarana demi mendukung penyelenggaraan program keahlian.
2. Perlunya pengadaan kelengkapan alat yang masih minim demi mendukung penyelenggaraan program keahlian.
3. Perlunya membuat regenerasi dari staf manajemen sekolah sebagai pelaksana dalam merumuskan kebijakan spektrum keahlian dan penyusunan kurikulum sekolah.
4. Perlunya sosialisasi kepada bapak/ibu guru belum memahami secara utuh tentang kurikulum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. (2003). *Undang – Undang RI Nomor 20, Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Prasetyani, Henny. (2017) Relevansi Kompetensi Lulusan SMK Kompetensi Keahlian Multimedia Terhadap Kebutuhan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DUDI) Ditinjau Dari Kurikulum di Kabupaten Pati. *Skripsi*. tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Agustus 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka Sebesar 5,34 %*. diunduh pada 10 Februari 2019 dari www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Keadaan Ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka Sebesar 3,35 %*. diunduh pada 10 Februari 2019 dari www.yogyakarta.bps.go.id
- Wahyu, Nursalim. (2016). Relevansi Kompetensi Mata Pelajaran Produktif Pengelasan di SMKN 1 Sedayu Dengan Kompetensi Las di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Vol. 4, No. 4, pp 277-280*
- Dwi, Jayanti. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) Terhadap Hasil Kompetensi Keahlian Siswa Kelas XII Tata Niaga SMK Negeri 2 Nganjuk, *Jurnal Pendidikan Tata Niaga, Vol. 2 No. 2, pp 2-3*
- Kemdikbud. (2018). *Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 6, Tahun 2018, tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK*
- Miles dan Huberman, (2014). *Qualitative Data Analyzis*. California: Sage